

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN KOPERASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI KEUANGAN (STUDI KASUS PADA KPRI BHAKTI HUSADA LAMPUNG SELATAN)

Irwandi¹, Evi Yuniarti², Dedi Sulaimawan³

¹*Jurusan Komputerisasi Akuntansi, AMIK Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung*

²*Jurusan Akuntansi, Polinela Bandar Lampung*

³*Jurusan Komputerisasi Akuntansi, AMIK Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung*
E-Mail: Irwandits@yahoo.co.id¹, eviyuniarti@polinelaac.id², dedykochun@yahoo.com³

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kesesuaian penerapan akuntansi di KPRI Bhakti Husada Lampung Selatan dengan SAK-ETAP yang disyaratkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015.. Hasil lain yang mendukung adalah melalui penelusuran penerapan akuntansi telah dilakukan secara konsisten menyusun laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh pengurus melalui rapat anggota tahunan. Selanjutnya kepada KPRI Bhakti Husada untuk segera memperbaiki format laporan sisa hasil usaha yang belum sesuai sehingga kualitas informasi keuangan terutama berkaitan dengan sisa hasil usaha menjadi lebih baik dan kepercayaan anggota terhadap pengurus menjadi meningkat. Diharapkan kepada pengurus koperasi, terutama pegawai akuntansi mengikuti pelatihan akuntansi koperasi untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang disyaratkan oleh peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kata kunci: SAK-ETAP, Informasi Keuangan, Akuntansi Koperasi

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS IN THE FRAMEWORK OF INCREASING THE QUALITY OF FINANCIAL INFORMATION (CASE STUDY ON KPRI BHAKTI HUSADA LAMPUNG SELATAN)

Irwandi¹, Evi Yuniarti², Dedi Sulaimawan³

1) Accounting Computerization Department, AMIK Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung

2) Accounting Department, Polinela Bandar Lampung

3) Accounting Computerization Department, AMIK Dian Cipta Cendikia Bandar Lampung

E-Mail: Irwandits@yahoo.co.id¹, eviyuniarti@polinelaac.id², dedykochun@yahoo.com³

Abstract. The purpose of this study was to measure the suitability of the application of accounting at KPRI Bhakti Husada South Lampung with SAK-ETAP required by the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Other results support is through tracing the application of accounting that has been carried out consistently in compiling financial reports that are accounted for by the management through the annual member meeting. Furthermore, to KPRI Bhakti Husada to immediately improve the format of the remaining operating results report which is not appropriate so that the quality of financial information, especially related to the remaining operating results, becomes better and members' trust in the management increases. It is expected that cooperative management, especially accounting staff, will attend cooperative accounting training to increase accounting knowledge in accordance with the Accounting Standards for Financial Entities Without Public Accountability required by the regulations of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises.

Keywords: SAK-ETAP, Financial Information, Cooperative Accounting

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu unit bisnis yang tidak kalah pentingnya dalam memajukan perekonomian, mempunyai kesempatan menjalankan kegiatan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan (sisa hasil usaha), namun dalam aktivitasnya kegiatan bisnisnya tetap menerapkan prinsip prinsip koperasi, salah satunya pengelolaan secara demokratis. Pengelolaan koperasi harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dimana anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi pengurus koperasi yang telah terpilih bertanggung jawab mengendalikan seluruh kegiatan koperasi termasuk mengambil keputusan atas hal hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi. Keputusan yang sangat penting diantaranya adalah keputusan berkaitan dengan masalah keuangan, seperti keputusan dalam memenuhi sumber keuangan, atau pembelian aset, dan keputusan keuangan lainnya. Keputusan keuangan menjadi tepat dan benar sangat diperlukan bagi kelangsungan dan perkembangan koperasi sehingga kesejahteraan koperasi dapat tercapai dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian kualitas informasi keuangan yang dihasilkan menjadi sangat

penting untuk mendukung dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat dan benar. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dapat menyesatkan penggunaanya (Adiputra, 2017). Dengan demikian informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai standar akuntansi koperasi dapat menghindari kesesatan dan menurut S. Munawir, 2014 menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperbandingkan dalam beberapa periode akan lebih bermanfaat dan membantu bagi pihak yang berkepentingan dalam menganalisis perkembangan koperasi sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan. Dengan demikian penerapan standar akuntansi koperasi menjadi sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan koperasi sesuai dengan standar dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dengan benar untuk melihat perkembangan keberhasilan koperasi.

Pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK ETAP sangat diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan koperasi karena SAK ETAP digunakan pada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Kualitas sumber daya manusia dalam implementasi SAK ETAP pada koperasi

sangat dibutuhkan karena, jika pengurus koperasi tidak memahami SAK ETAP dengan baik maka dapat berakibat tidak baik pada laporan keuangan koperasi yang dihasilkan (Arismawati, 2017).

Laporan keuangan koperasi mempunyai standar akuntansi yang bertujuan memberikan informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha koperasi. Pada tanggal 23 Oktober 2010 Dewan Standar Akuntansi keuangan telah menerbitkan Exposure Draft (ED) Pernyataan Pencabutan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal tersebut dilandasi sebagai dampak dari konvergensi Internal Financial Volume: 1, Nomor: 2, 2022. halaman 139 Reporting Standard (IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan standar akuntansi keuangan untuk suatu industri tertentu. Sehingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan pedoman akuntansi keuangan koperasi usaha simpan pinjam agar dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Ketentuan dasar penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pedoman tersebut bertujuan menciptakan

keseragaman dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya banding diantara laporan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan koperasi. Ukuran yang sangat penting untuk melihat kualitas informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi adalah relevan, daya uji, bisa dimengerti, tepat waktu, dan netral.

KPRI Bhakti Husada merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Lembaga ini dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan dana yang cukup besar.

Bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana yang cukup besar tersebut dinyatakan melalui laporan keuangan koperasi yang dihasilkan setiap tahunnya. Menjadi hal penting bagi anggota koperasi bahwa laporan keuangan yang disajikan haruslah berkualitas sehingga mudah dimengerti. Selain dengan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang hasil usaha dan keadaan keuangan koperasi.

Dalam penelitian awal ditemukan koperasi secara rutin membuat laporan keuangan tahunan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi saat rapat anggota tahunan. Salah satu agenda rapat adalah pembagian sisa hasil usaha yang jumlahnya tergantung dari laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan yang dibuat. Berdasarkan data awal yang diperoleh terlihat format laporan keuangan terutama laporan sisa hasil usaha belum sepenuhnya mengikuti format sesuai dengan standar akuntansi yang syaratkan seperti dalam SAK-ETAP.

TINJAUAN TEORITIS

Standar Akuntansi Koperasi

Menurut Undang undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Tugas Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk

mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Oleh karena koperasi harus memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan Keputusan strategis untuk pengembangan koperasi dimasa yang akan datang. Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS). Dewan Standar Akuntansi Keuangan,

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS (International Financial Report Standard) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum).

Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP dan SAK. ETAP ini diadopsi dan diundangkan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan

Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan menurut Kieso, et al (2016:2) adalah accounting consist of the three basic activities it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interestusers. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accountingreports arecalledfinancial statement. Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan. Sedangkan menurut Haryono, J

(2011) akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau lebih tepat disebut bahasa pengambilan keputusan. Semakin dikuasai bahasa ini akan semakin baik pengelolaan berbagai aspek keuangan, selanjutnya menurut Sutrisno (2010) akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Koperasi

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan koperasi, paling tidak ada 7:

1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
3. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur
4. Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional.
5. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi.
6. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau.
7. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil.

Laporan Keuangan

Menurut Surya (2012) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam unsur yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Selain itu unsur yang berkaitan dengan kinerja dalam

laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Lebih lanjut menurut Rudianto (2010), laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan disusun dengan dasar akrual (accrual basis) dan asumsi kelangsungan usaha (going concern) perusahaan. Berdasarkan metode akrual, pengaruh transaksi ekonomi dan peristiwa ekonomi internal lainnya diakui dan dicatat dalam akuntansi pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan keuangan yang disusun dengan metode akrual (kecuali dalam hal – hal yang berhubungan dengan informasi pada laporan arus kas) memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban (obligation) pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan (Surya, 2012; 9)

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

Ruang lingkup dan dasar penyusunan laporan keuangan yang mengatur penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi. Pedoman akuntansi mengatur penyusunan laporan keuangan kegiatan usaha meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (infaq/sedekah dan wakaf), Catatan atas laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan pedoman PSAK Syariah, SAK-ETAP, Standar Akuntansi lain berlaku dan sesuai dengan perkoperasian, peraturan perundang undangan yang relevan dengan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.

Komponen laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan dari laporan sisa hasil usaha terdiri dari :

Pendapatan operasional utama
Pendapatan operasional lainnya
Hak bagi hasil penyimpanan
Pendapatan non operasional,
Sisa hasil usaha kotor
Beban operasional, terdiri dari :

- a. beban usaha dan
 - b. beban perkoperasian
- Beban lainnya,
Beban pajak
Sisa hasil usaha.

Pada komponen neraca terdiri :

Aset dibagi:

- a. Aset lancar
- b. Aset tidak lancar

Kewajiban terdiri dari:

- a. kewajiban jangka pendek
- b. Kewajiban jangka panjang

Ekuitas terdiri:

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Hibah/sumbangan
- d. SHU tahun berjalan
- e. cadangan
- f. Modal lainnya

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode atau pendekatan studi kasus (cases study). Penelitian ini mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Tempat penelitian dilakukan

pada KPRI Bhakti Husada di Kalianda Lampung Selatan. Koperasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung seperti Rapat Umum Anggota dilakukan secara rutin setiap akhir tahun, telah melaksanakan pencatatan akuntansi secara lengkap dan diketahui sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh sangat besar dalam jumlah milyaran jauh dibanding koperasi lain yang berada di Lampung selatan.

Riset dilakukan bertujuan menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana dan bagaimana melakukannya (Jogianto, 2004). Menurut gay (1976) dalam bukunya Umar (2011) metode deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut pada waktu berlangsung proses riset.

Selanjutnya penelitian deskriptif menurut Consuelo (1998) dalam bukunya Umar (2011) terbagi dalam bermacam-macam jenis, salah satunya jenis studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Dengan demikian tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif jenis studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggota KPRI Bhakti Husada merupakan koperasi milik Dinas Kesehatan Kalianda Lampung Selatan yang utamanya bergerak dibidang simpan pinjam dengan jumlah anggota hampir 3.000 orang, tepatnya mencapai 2.800 orang.

Tabel 2. Perbandingan Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan KPRI Bhakti Husada Lampung Selatan

| NO | KOMPONEN | SESUAI / TIDAK SESUAI |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| A. Aset Lancar | | |
| 1 | Masa manfaat kurang dari satu tahun | Sesuai |
| 2 | klasifikasi aset lancar sesuai dengan kelikuidannya | Sesuai |
| B. Aset Tidak Lancar | | |
| 3 | masa manfaat lebih dari satu periode | Sesuai |
| 4 | dicatat sebesar harga perolehannya | Sesuai |
| 5 | adanya perhitungan penyusutan aset tetap | Sesuai |
| C. Kewajiban Jangka Pendek | | |
| 6 | harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun | Sesuai |
| 7 | dicatat sebesar nilai nominalnya | Sesuai |
| D. Kewajiban jangka panjang, | | |
| 8 | harus dilunasi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun | Sesuai |
| 9 | dicatat sebesar nilai nominalnya | Sesuai |
| E. Ekuitas | | |
| 10 | Sumber dari anggota | Sesuai |

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------|
| 11 | Sumber dari dalam koperasi | Sesuai |
| Komponen ekuitas: | | |
| 12 | Simpanan pokok, sebesar nilai nominal | Sesuai |
| 13 | Simpanan wajib, sebesar nilai nominal | Sesuai |
| 14 | Hibah/ Donasi | Sesuai |
| 15 | SHU yang tidak dibagi | Sesuai |
| 16 | Cadangan-cadangan | Sesuai |
| F. Pendapatan | | |
| 17 | Pendapatan Operasional Utama | Tidak Sesuai |
| 18 | Pendapatan Operasional lainnya | Tidak Sesuai |
| 19 | Pendapatan Non Operasional | Tidak Sesuai |
| 20 | Pendapatan lainnya | Tidak Sesuai |
| G. Beban | | |
| 21 | Beban operasional-Beban usaha | Tidak Sesuai |
| 22 | Beban operasional-Beban perkoperasian | Tidak Sesuai |
| 23 | Beban lainnya | Tidak Sesuai |
| H. Laporan Perubahan Ekuitas | | |
| 24 | Penambah Ekuitas | Sesuai |
| 25 | Pengurang ekuitas | Sesuai |
| I. Catatan Atas Laporan Keuangan | | |
| 26 | Gambaran umum organisasi | Sesuai |
| 27 | Kebijakan Akuntansi | Sesuai |

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel 2 diperoleh hasil “SESUAI” dengan SAK-ETAP 20 item dan “TIDAK SESUAI” dengan SAK-ETAP 7 item dengan jumlah keseluruhan pertanyaan 27 item, jadi perhitungan persentase menurut Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302) adalah:

$$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{100\%} \times 100\%$$

Σ Total Jawaban
Kuesioner

| | | |
|--------------|----|--------|
| Persentase = | 20 | x 100% |
| | 27 | |

Persentase = **74,07%**

Nilai perbandingan 74,07% masuk ke dalam kelompok ke empat yaitu persentase antara 51% sampai dengan 75% dengan penilaian kriteria cukup sesuai. Dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus koperasi dan disajikan setiap tahun pada rapat anggota tahunan telah cukup sesuai dengan SAK-ETAP seperti yang disyaratkan pada PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Per/M.KUKM/IX/2015. TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KOPERASI

Penilaian dengan kriteria tidak sesuai pada laporan sisa hasil usaha disebabkan karena format laporan yang dibuat belum sesuai dengan format yang disyaratkan pada SAK-ETAP, sehingga jumlah dalam rincian pengelompokan baik pada sisi pendapatan maupun sisi beban belum sesuai, walaupun jumlah perhitungan sisa hasil usaha (laba) atau hasil akhir dari

perhitungan laporan sisa hasil usaha sudah benar.

Hasil sesuai dengan SAK-ETAP pada aset lancar dilihat dari masa manfaat aset lancar kurang dari satu tahun yang diperkirakan dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal (12 bulan) dari satu tahun dan klasifikasi telah dilakukan dengan benar secara berurut berdasarkan kelikuidannya.

Pada aset tidak lancar dengan hasil sesuai dengan SAK-ETAP terutama dalam menentukan nilai aset sesuai dengan harga perolehan dan dilakukan penyusutan dengan metode sesuai dengan kebijakan akuntansi koperasi, yaitu metode garis lurus.

Hasil pada kewajiban baik pada kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang telah sesuai dengan SAK-ETAP terutama dilihat dari jangka waktu pelunasan maupun nilai nominal yang dicatat.

Ekuitas yang dilaporkan dengan hasil sesuai dengan SAK-ETAP terutama dilihat dari sumber pendanaannya maupun rincian komponen telah dilakukan dengan benar, termasuk komponen cadangan cadangan yang dibentuk dari pembagian sisa hasil usaha (SHU).

Pendapatan dan beban dengan hasil tidak sesuai dengan SAK-ETAP berdasarkan penilaian format laporan sisa hasil usaha (SHU) yang dibuat belum sesuai, terutama dalam klasifikasi pendapatan dan beban, walau demikian pencatatan pendapatan dan beban telah sesuai SAK-ETAP yaitu menggunakan metode akrual.

Pada laporan perubahan ekuitas dengan hasil sesuai dengan SAK-ETAP baik dari sisi penambahan maupun pengurangan ekuitas, teruma perubahan pada simpanan wajib dan perubahan dari hasil sisa hasil usaha. Selanjutnya penerapan pada catatan atas laporan keuangan dinilai sesuai dengan SAK-ETAP berisikan gambaran umum organisasi dengan jelas dan terperinci serta menjelaskan kebijakan akuntansi yang diambil koperasi terutama berkaitan dengan penentuan harga perolehan aset tetap, metode penyusutan aset tetap dan penentuan metode pengakuan pendapatan dan beban. Nilai aset tetap ditetapkan dengan menggunakan harga perolehan, metode penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan metode akrual saat terjadinya transaksi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan

1. Secara umum Akuntansi KPRI Bhakti Husada Lampung Selatan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi.
2. Laporan Keuangan KPRI Bhakti Husada Lampung Selatan sudah cukup sesuai dengan SAK-ETAP, hanya saja format laporan sisa hasil usaha perlu dialukan peruban mengikuti format SAK-ETAP dan klasifikasi pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi

Saran

Berdasarkan simpulan yang dibuat, maka disarankan kepada Bhakti Husada Lampung Selatan,

1. Segera melakukan perubahan format laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai standar SAK-ETAP
2. Segera dibuatkan daftar akun yang lengkap, terutama yang memuat akun akun berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan laporan sisa hasil usaha (SHU) agar konsisten dalam penggunaan nama akun dari periode ke periode berikutnya.
3. Sebaiknya pengurus koperasi, terutama yang bertanggung langsung terhadap akuntansi termasuk staf akuntansi meningkatkan pengetahuannya terutama yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi dan SAK-ETAP.
4. Perlunya dilakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi sesuai SAK-ETAP terutama kepada staf akuntansi.

Efektivitas Kinerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 8

Adiputra, I. M. S., Sinarwati, N. K., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP, Kualitas Pelatihan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Karangasem). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 8(2).

DAFTAR PUSTAKA

- Arismawati, K. N., Sulindawati, N. L. G. E., dan Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP, Kematangan Usia, Perilaku, dan AL. Haryono Jusup.2011. Dasar - Dasar Akuntansi JILID I EDISI KE-7. STIE YKPN.
- Fahmi Irham. 2018. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011, Buletin Teknis 6. Keterterapan SAK ETAP Untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Koswara, dkk. 2011. Dean J. Champion : Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung: Reefika Aditama.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition. United States: WILEY
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil
- Rudianto, 2010, Akuntansi Koperasi, Jakarta : Erlangga
- Surya, Raja Andri Satriawan, 2012, Akuntansi Keuangan Versi IFRS +, Ed 1 Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutrisno. 2010. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: EKONISIA
- S. Munawir, 2014, Analisis Laporan Keuangan, Liberty. Yogyakarta.
- Umar Husein. 2011. Riset Akuntansi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta